

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB, IPM, DAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



TUTY LISA ALAWIYAH HARAHAP

NPM 165111011

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Damai

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TUTY LISA ALAWIYAH HARAHAP
NPM : 165111011
FAKULTAS : EKONOMI
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN S1
PEMBIMBING : Drs. H. ARMIS, M.Si
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB, IPM DAN
TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

MENYETUJUI :

PEMBIMBING

(Drs. H. Armis, M.Si)

MENGETAHUI :

KETUA JURUSAN

(Drs.M.Nur, MM)



DEKAN
(Dr. Firdaus A. Rahman, SE.,M.Si.,Ak.CA)

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB, IPM DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

Oleh :Tuty Lisa AlawiyahHarahap

(DibawahBimbingan Drs. H. Armis, M.Si)

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: “Menganalisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau”. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari tahun 2005 hingga tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan menggunakan beberapa uji yaitu Uji statistic Uji asumsi klasik. Data diolah dengan menggunakan aplikasi Eviews 9. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) Jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau; 2) PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau; 3) IPM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau; 4) Tingkat pengangguran berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

Kata Kunci: JumlahPenduduk, PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF NUMBER OF POPULATION, GRDP, HDI AND UNEMPLOYMENT RATE ON POVERTY LEVELS IN RIAU PROVINCE

By: Tuty Lisa AlawiyahHarahap

(Under the guidance of Drs. H. Armis, M.Si)

This research was conducted in Riau Province. The objectives of this study are: "To analyze the effect of population, GRDP, HDI and the unemployment rate on poverty levels in Riau Province". The type of data used in this study is secondary data in the form of annual quantitative numbers from 2005 to 2019. This study uses multiple linear regression analysis methods and uses several tests, namely the classical assumption test. The data were processed using the Eviews 9 application. From the results of this study, it is known that: 1) The population does not significantly influence the poverty level in Riau Province; 2) GRDP has no significant effect on the poverty level in Riau Province; 3) HDI does not significantly affect poverty in Riau Province; 4) The unemployment rate has a significant and positive effect on the poverty rate in Riau Province.

Keywords: Population, GRDP, HDI, Unemployment Rate, Level Poverty

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'la karena dengan rahmat, dan karunia-Nya yang menciptakan manusia dengan kelebihan akal untuk berfikir terhadap alam dan lingkungan serta dengan peranan kalam, berkat hidayah dan petunjuk serta kerja dan kesungguhan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB, IPM DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU” guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Dengan demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan pengetahuan penulis dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan limpahan kepada Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam, dan keluarga serta para sahabatnya mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan pengarahannya serta motivasi yang telah diberikan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini disamping bantuan lain dari berbagai pihak yang juga sangat bermakna.

Oleh karena itu pada kesempatan ini tidak ada kata lain yang lebih indah dan lebih layak dan penghargaan yang mendalam dari penulis kepada :

1. Bapak Dr. Firdaus A. Rahman, SE., M.Si.,AK CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Bapak Pembantu Dekan I,II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. M . Nur.,MM selaku ketua jurusan dan penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi dalam membentuk konsep utama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Sinta Yulyanti, SE.,M.Ec.Dev selaku sekretaris jurusan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Armis, M.Si sebagai pembimbing, yang telah meluangkan waktu, memberikan banyak saran, perbaikan dan motivasi untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini,
6. Bapak M. Irfan Rosyadi M.E sebagai Penguji II, yang telah memberikan arahan dan saran yang sangat membangun dalam perbaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf yang berada di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan pelayanannya sangat membantu terealisasikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Instansi Pemerintah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau yang sangat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis.

9. Terima kasih tiada tara kepada Orang Tua saya yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi, dukungan, serta nasihat yang tiada henti dan kasih sayang yang tulus kepada saya selaku penulis.
10. Terima kasih kepada Kakak, Abang dan segenap Saudara yang memberikan do'a, motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Sepupu-sepupu Annisa Mayasari, Desty Maharani Sinambela, Fitri Maiyani HarahapAMd, Riska Meiranda, Puja Auliya Amd.Kep, Windy Andriani yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
12. Terima kasih kepada teman-teman Agustri Astuti, Chronika Sari, Desra Siallagan, Hapta Risnitia, Nilam Fitriana, Nursyafina, Novianti Br Butar Butar, Rani Novitasari, Weni Ariska yang telah memberikan waktu dan dukungan semasa proses penelitian ini.
13. Dan terima kasih kepada teman-teman Ekonomi Pembangunan kelas B angkatan 2016 yang memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga proses penelitian ini, semoga kita semua bisa meraih kesuksesan dan impian kita dapat terwujud.

Atas semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semog Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada mereka semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

Pekanbaru, Agustus 2020

TUTY LISA ALAWIYAH HARAHAP



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK..... | i |
| ABSTRACT..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESA | |
| 2.1 Telaah Pustaka..... | 12 |
| 2.1.1 Kemiskinan..... | 12 |
| 2.1.2 Jumlah Penduduk..... | 16 |
| 2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto..... | 17 |
| 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia..... | 19 |
| 2.1.5 Tingkat Pengangguran..... | 20 |
| 2.1.6 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan..... | 24 |

| | | |
|----------------|--|----|
| | 2.1.7 Hubungan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan..... | 24 |
| | 2.1.8 Hubungan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan | 24 |
| | 2.1.9 Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan | 25 |
| | 2.2 Penelitian Terdahulu | 26 |
| | 2.3 Hipotesis..... | 27 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| | 3.1 Lokasi Penelitian..... | 28 |
| | 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian | 28 |
| | 3.3 Jenis dan Sumber Data | 28 |
| | 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| | 3.4 Defenisi Variabel Penelitian..... | 29 |
| | 3.5 Metode Analisis Data | 30 |
| | 3.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda..... | 31 |
| | 3.5.2 Uji Statistik | 32 |
| | 3.5.3 Uji Asumsi Klasik..... | 33 |
| BAB IV | GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 36 |
| | 4.1 Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Riau | 36 |
| | 4.2 Kondisi Penduduk Provinsi Riau | 40 |
| | 4.3 Kondisi Jumlah Penduduk di Provinsi Riau | 42 |
| | 4.4 Kondisi PDRB di Provinsi Riau..... | 42 |
| | 4.2 Kondisi IPM di Provinsi Riau | 43 |
| | 4.3 Kondisi Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau..... | 44 |
| | 4.4 Kondisi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau | 44 |
| BAB V | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 45 |

| | |
|--|----|
| 5.1 Analisis Data | 45 |
| 5.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda..... | 45 |
| 5.1.2 Uji Statistik..... | 48 |
| 5.1.3 Uji Asumsi Klasik | 50 |
| 5.2 Pembahasan..... | 56 |
| 5.2.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan | 56 |
| 5.2.2 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan | 57 |
| 5.2.3 Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan..... | 57 |
| 5.2.4 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan | 58 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | 60 |
| 6.1 Kesimpulan | 60 |
| 6.2 Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau 2005-2019..... | 3 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Penduduk di Provinsi Riau 2005-2019..... | 4 |
| Tabel 1.3 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2005-2019..... | 5 |
| Tabel 1.4 | Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau 2005-2019..... | 6 |
| Tabel 1.5 | Tingkat Penganggura di Provinsi Riau 2005-2019..... | 7 |
| Tabel 2.1 | Tabulasi Penelitian Terdahulu..... | 25 |
| Tabel 4.1 | Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019..... | 39 |
| Tabel 4.2 | Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota d Provinsi Riau Tahun 2019..... | 40 |
| Tabel 5.1 | Hasil Analisis Regresi Linear Berganda..... | 45 |
| Tabel 5.2 | Hasil Uji t..... | 47 |
| Tabel 5.3 | Hasil Uji Normalitas Residual..... | 51 |
| Tabel 5.4 | Hasil Uji Multikolinieritas..... | 52 |
| Tabel 5.5 | Hasil Uji Heteroskedastisitas..... | 53 |
| Tabel 5.6 | Hasil Uji Autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson..... | 54 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Variabel Penelitian

Lampiran 2 : Data Variabel Penelitian (Nilai Sebenarnya)

Lampiran 3 : Input Data

Lampiran 4 : Output Eviews 9



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda. Menurut *World Bank* (2004) dalam Wisnu Adhi Saputra (2011), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset (*lack of income and assets*), untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Kemiskinan bersifat multidimensi artinya, kebutuhan manusia bermacam-macam maka kemiskinan memiliki banyak aspek, diantaranya aspek primer yang berupa miskin asset, organisasi sosial, politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan pengetahuan sosial, sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termasuk dalam bentuk kekurangan gizi, perumahan yang tidak layak, perawatan kesehatan yang

kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah. Dimensi kemiskinan tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi aspeknya (Arsyad 2004:104).

Menurut Spicker dalam Safira (2012) penyebab kemiskinan dapat dibagi kedalam empat bagian yaitu pertama, individual Explanation ialah kemiskinan dalam terminologi karakteristik orang miskin itu sendiri, yang berupa hasil dari kemalasan dan beberapa macam kekurangan. Kedua, familial explanation yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan. Ketiga, subcultural explanation adalah kemiskinan karena pola perilaku, tapi lebih disebabkan oleh keadaan pada pilihan personal. Keempat, structural explanation ialah mengidentifikasi kemiskinan sebagai hasil dari masyarakat di tempat tersebut.

Todaro dan Smith (2006:269) menyatakan bahwa penduduk miskin pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan dengan mata pencarian dibidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sector ekonomi tradisional yang biasanya dilakukan secara bersama-sama. Mereka kebanyakan wanita dan anak-anak daripada laki-laki dewasa dan mereka sering terkonsentrasi di antara kelompok etnis minoritas dan kelompok pribumi. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir, 2008).

Tabel 1.1: Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau 2005-2019

| Tahun | Tingkat Kemiskinan (%) |
|-------|------------------------|
| 2005 | 12.51 |
| 2006 | 11.85 |
| 2007 | 11.20 |
| 2008 | 10.79 |
| 2009 | 9.45 |
| 2010 | 10.01 |
| 2011 | 8.17 |
| 2012 | 8.05 |
| 2013 | 8.42 |
| 2014 | 7.99 |
| 2015 | 8.42 |
| 2016 | 7.98 |
| 2017 | 7.78 |
| 2018 | 7.39 |
| 2019 | 7.08 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Riau dari tahun 2005 hingga tahun 2019 berfluktuatif. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 12,51% dan tingkat kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 7,08%. Karena tingkat kemiskinan masih tidak merata untuk itu perlu dicari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar dari tahun ketahun akan membuat tingkat kemiskinan semakin meningkat. Selain itu pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan menimbulkan masalah-

masalah baru baik dari segi sosial maupun ekonomi. Penduduk harus bisa dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subjek atau objek dalam pembangunan, pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Artinya bahwa pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan pembangunan infrastruktur semata agar tidak meningkatnya angka kemiskinan (Sukirno:2012).

Tabel 1.2: Jumlah Penduduk Provinsi Riau 2005-2019

| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|-------|------------------------|
| 2005 | 4.614.930 |
| 2006 | 4.953.004 |
| 2007 | 5.070.952 |
| 2008 | 5.182.237 |
| 2009 | 5.365.358 |
| 2010 | 5.574.928 |
| 2011 | 5.726.241 |
| 2012 | 5.879.109 |
| 2013 | 6.033.268 |
| 2014 | 6.188.442 |
| 2015 | 6.344.402 |
| 2016 | 6.500.971 |
| 2017 | 6.657.911 |
| 2018 | 6.814.909 |
| 2019 | 6.971.745 |

Sumber : Badan Pusat Provinsi Riau Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Riau dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah penduduk pada tahun 2005 sebesar 4.614.930 jiwa dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2019 sebesar 6.971.745 jiwa. Jumlah penduduk yang besar dari tahun ketahun akan membuat tingkat kemiskinan semakin meningkat. Selain itu pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan menimbulkan masalah-masalah baru baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu (Kuncoro:2001).

Tabel 1.3: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2005-2019

| Tahun | PDRB (Miliar Rupiah) |
|-------|----------------------|
| 2005 | 139.018.99 |
| 2006 | 167.068.19 |
| 2007 | 210.002.56 |
| 2008 | 276.400.13 |
| 2009 | 297.173.03 |
| 2010 | 345.773.81 |
| 2011 | 413.706.12 |
| 2012 | 469.073.02 |
| 2013 | 522.241.43 |
| 2014 | 679.395.86 |
| 2015 | 652.761.63 |
| 2016 | 681.699.03 |
| 2017 | 704.797.58 |
| 2018 | 755.274.29 |
| 2019 | 765.198.30 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.3 nilai PDRB pada tahun 2005 sebesar 139.018.99 miliar rupiah dan mengalami kenaikan setiap tahunnya, terakhir pada tahun 2019 sebesar 765.198.30 miliar rupiah. Nilai PDRB di Provinsi Riau menunjukkan hasil peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi nilai PDRB ini belum mampu untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Riau.

Salah satu sumber yang menyebabkan pengaruh jumlah penduduk miskin salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu torosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkolerasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Karena itu diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah.

Tabel 1.4: Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau 2005-2019

| Tahun | IPM (%) |
|-------|---------|
| 2005 | 73.63 |
| 2006 | 73.81 |
| 2007 | 74.63 |
| 2008 | 75.09 |
| 2009 | 75.60 |
| 2010 | 68.65 |
| 2011 | 68.90 |
| 2012 | 69.15 |
| 2013 | 69.91 |
| 2014 | 70.33 |
| 2015 | 70.84 |
| 2016 | 71.20 |
| 2017 | 71.79 |
| 2018 | 72.44 |
| 2019 | 73.00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.4 bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau tahun 2005 sampai tahun 2019 berfluktuatif. Pada tahun 2005 sebesar 73,63% mengalami kenaikan sampai tahun 2009 sebesar 75,60% dan pada tahun 2010 sebesar 68,65% mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2011

sebesar 68,90% mengalami kenaikan terus menerus dari tahun ketahun, hingga tahun 2019 sebesar 73,00%.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian. Akan tetapi, ada beberapa para ahli kurang menekankan aspek penduduk, dengan menganggap bahwa penduduk memiliki peran pasif yang hanya berfungsi sebagai penyediaan tenaga kerja dalam proses produksi. Perkembangan selanjutnya tentang analisis posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi sejalan dengan lahirnya teori pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.5: Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau Tahun 2005-2019

| Tahun | Tingkat Pengangguran (%) |
|-------|--------------------------|
| 2005 | 12.16 |
| 2006 | 10.24 |
| 2007 | 9.52 |
| 2008 | 8.20 |
| 2009 | 8.56 |
| 2010 | 8.72 |
| 2011 | 6.09 |
| 2012 | 4.37 |
| 2013 | 5.48 |
| 2014 | 6.56 |
| 2015 | 7.83 |
| 2016 | 7.43 |
| 2017 | 6.22 |
| 2018 | 6.20 |
| 2019 | 5.97 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.5 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Riau dari tahun 2005 sampai 2019 mengalami fluktuatif. Tingkat pengangguran dengan persentase paling tinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 12,16% dan tingkat pengangguran dengan persentase paling rendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 4,37%. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran dalam penelitian ini ialah tingkat pengangguran. Dimana tingkat pengangguran memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB, IPM, TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah ditemukan di atas maka masalah yang dapat penulis rumuskan dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto,

Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran yang dapat dipertimbangkan bagi pemerintah serta instansi terkait.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun bidang lain yang berhubungan.

3. Bagi Penulis

Sebagai bentuk implementasi ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan, program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini langkah untuk mempermudah dalam pemahaman, maka penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan dari beberapa bab tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pada bab ini mengemukakan landasan teori atau kajian pustaka yang merupakan konsep yang disusun secara sistematis tentang variabel dalam sebuah penelitian dan penelitian terdahuluyang merupakan informasi yang diperoleh dari peneliti atau studi yang dilakukan melalui eksperimen atau observasi serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah karena masih diperlukan kebenarannya.

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data penelitian.

BAB IV: GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah dan geografis daerah Provinsi Riau.

BAB V: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan secara singkat jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau untuk menjawab hipotesis sebelumnya.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran penulis sebagai sumbangan pemikiran.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kalangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif. Sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluasi, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat.

Ada beberapa pengertian kemiskinan di Indonesia yang dinyatakan oleh beberapa ahli (Widodo, 2006-297) sebagai berikut:

1. Menurut Sajogyo, kemiskinan ialah suatu tingkatan kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimal yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan ata kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

2. Menurut Salim, kemiskinan ialah keadaan penduduk yang meliputi hal-hal yang tidak memiliki mutu tenaga kerja tinggi, jumlah modal yang memadai, luas tanah dan sumber daya alam yang cukup, keaslian dan keterampilan yang tinggi, dan rangkuman hidup yang memungkinkan perubahan dan kemajuan..
3. Menurut Soemitro, kemiskinan ditandai dengan tingkat hidup rendah tertekan. Hal ini merupakan akibat dari serangkaian keganjilan dan kepincangan yang terdapat pada pertimbangan keadaan dasar dan kerangka susunan masyarakat itu sendiri dan menyangkut beberapa masalah yaitu:
 - a. Keadaan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sebagai sumber produksi yang menyangkut sumber daya alam, modal dan keterampilan.
 - b. Kepincangan akibat sebagai sector ekonomi, modal dan penggunaan teknologi, dimasa lampau dilakukan paling intensif disektor-sektor yang terbatas yaitu sektor perkebunan dan pertambangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan bahwa kemiskinan absolut Indonesia merupakan ketidak mampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum energi kalori yang digunakan tubuh dan kebutuhan dasar minimum seperti sandang, pangan, papan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Dalam pengukuran kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan kemiskinan dapat

dilihat dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan atau dibawah garis kemiskinan.

Menurut Hastitah (2017), bahwa ada dua jenis kemiskinan diantaranya adalah:

1. Kemiskinan buatan, kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak menguasai sarana, sumber daya, dan fasilitas ekonomi yang secara merata.
2. Kemiskinan alamiah, kemiskinan yang berkaitan dengan kelangkaan sumberdaya alam, dan prasarana umum serta keadaan tanah yang tandus.

2.1.1.1 Ukuran Kemiskinan

Arsyad (2004) dalam mengukur kemiskinan dibagi dua macam cara yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk sandang, pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau

ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan

Kuncoro (2010) adanya kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, adapun sebab-sebabnya:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, kualitas SDM yang rendah berarti produktivitasnya rendah yang rendah pada akhirnya akan mengakibatkan perolehan upah yang rendah juga. Keadaan rendahnya kualitas SDM ini diakibatkan oleh rendahnya pendidikan dikalangan penduduk miskin, selain itu ada faktor diskriminasi atau faktor keturanan.

2.1.1.3 Pengentasan Kemiskinan

Basri Faisal (2002) adapun pengentasan kemiskinan sebagai berikut:

1. Menyediakan lembaga konsultasi untuk membantu masyarakat miskin yang bisa merangsang lebih banyak pemberian pinjaman dan dukungan kredit mikro untuk masyarakat yang sanat miskin.
2. Memacu penyediaan lapangan pekerjaan penuh dan produktif serta memperkuat integrasi sosial.

3. Mengubah bentuk insentif institusional bagi birokrasi di tingkat lokal, dengan jalan memberikan pelayanan perizinan usaha secara gratis, sehingga usaha kecil akan tergolong untuk mendaftarkan usahanya dan pemerintah daerah dapat memperoleh peningkatan pajak dari usaha kecil tersebut.
4. Menyusun kebijakan yang mengarah pada stabilitas ekonomi dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan hasilnya bisa terdistribusikan pada seluruh lapisan masyarakat secara adil.
5. Meningkatkan akses kelompok ekonomi kecil terhadap berbagai sumber daya ekonomi, yaitu terutama modal, tanah, serta informasi dan teknologi.

2.1.2 Jumlah Penduduk

Menurut Maier di kutip dari Kuncoro (1997), jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat. Penduduk yang meningkat cepat dapat menjerumuskan perekonomian ke pengangguran dan kekurangan lapangan kerja. Karena penduduk meningkat, proporsi pekerja pada penduduk total menjadi naik. Tetapi karena ketiadaan sumber pelengkap, tidaklah mungkin untuk mengembangkan lapangan pekerjaan. Penduduk yang meningkat dengan cepat mengurangi pendapatan, tabungan dan investasi. Karenanya pembentukan modal menjadi lambat dengan begitu meningkatlah pengangguran (Jhingan, 2003:407)

Dalam teori penduduk, Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa jumlah penduduk akan melampaui jumlah persediaan bahan pangan yang dibutuhkan selanjutnya Malthus sangat prihatin bahwa jangka waktu yang dibutuhkan penduduk berlipat dua jumlahnya sangat pendek, ia melukiskan bahwa apabila tidak dilakukan pembatasan, penduduk cenderung berkembang menurut deret ukur. Dari deret-deret tersebut terlihat bahwa akan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan persediaan bahan pangan yang tersedia (Mantra, 2000:35).

Jumlah penduduk yang tidak terkendali menurut Licolin akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya penambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas (Arsyad, 2004:267).

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto ialah nilai barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat tergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran Produk Domestik Regional Bruto bervariasi antar daerah (Hadi Sasana, 2006).

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator ekonomi yang memuat instrument ekonomi makro dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Produk Domestik Bruto didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam Negara tersebut dalam kurun waktu tertentu. Produk Domestik Bruto mengukur pengeluaran total suatu perekonomian terhadap barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu tertentu. Produk Domestik Bruto suatu ukuran tentang tingkat kesejahteraan ekonomi, hal ini disebabkan karena masyarakat yang menginginkan pendapatan yang lebih banyak. Namun, PDB tidak menjadi tolak ukur kesejahteraan secara sempurna karena didalamnya tidak mencakup nilai kelestarian lingkungan (Gregory Mankiw, 2000).

Menurut Sadorno Sukirno (2004), cara perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan melalui tiga cara dalam pendekatan, yaitu:

1. Cara pendekatan pengeluaran

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeruan atau pembelanjaan atas barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu Negara.

2. Cara pendekatan produksi

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sector lapangan usaha dalam perekonomian.

3. Cara pendekatan pendapatan

Dengan cara ini perhitungan pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam mewujudkan pendapatan nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut, karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi maka seharusnya kemiskinan rendah. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia (Napitupulu, 2017).

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah.

Teori pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diukur dengan 3 dimensi diantaranya adalah: berumur panjang dan sehat ditunjukkan oleh harapan hidup ketika lahir yang dirumuskan menjadi Angka Harapan Hidup. Kemudian, pada dimensi ilmu pengetahuan yang diukur dari tingkat baca tulis dan rata-rata lama sekolah dapat dirumuskan menjadi indeks pendidikan. Terakhir adalah standar hidup layak yang ditunjukkan oleh pengeluaran riil perkapita (Hasan, 2016).

2.1.5 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran menunjukkan persentase jumlah orang yang ingin bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan. Ukuran seseorang sudah dapat disebut bekerja sangat bervariasi antar negara, bahkan antar lembaga yang berbeda di dalam suatu negara juga berbeda. Pembahasan mengenai pengangguran sangat terkait dengan persoalan kependudukan. Proses perubahan kependudukan itu sendiri dipengaruhi oleh proses pembangunan ekonomi. Proses ini terjadi akibat perubahan pada struktur permintaan, struktur produksi dan perbaikan fasilitas kesehatan, gizi serta pendidikan yang timbul seiring dengan pertumbuhan pendapatan perkapita (Herlambang et.al, 2002:107).

Faktor utama yang menimbulkan pengangguran ialah kekurangan pengeluaran agregat. Disamping itu faktor-faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah (1) Menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik, (2) pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, dan (3) ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja

yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri (Sukirno, 2004).

2.1.5.1 Ciri-ciri Pengangguran

Menurut Sukirno (2004:330) berdasarkan cirri-cirinya pengangguran dapat dibedakan menjadi 4 bagian yaitu:

1. Pengangguran terbuka, ialah pengangguran yang terjadi akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja.
2. Pengangguran tersembunyi, ialah pengangguran yang terjadi apabila dalam suatu kegiatan perekonomian jumlah tenaga kerja sangat berlebihan.
3. Pengangguran musiman, ialah pengangguran yang terjadi pada waktu tertentu didalam satu tahun.
4. Setengah menganggur, ialah pengangguran yang terjadi akibat kelebihan penduduk di sector pertanian yang disertai oleh pertambahan penduduk yang sangat cepat dari tahun ke tahun telah menimbulkan percepatan dalam proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk mencari pekerjaan di kota, sehingga banyak yang dibawah rata-rata.

2.1.5.2 Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2010:226) pengangguran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran Struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dan perekonomian.
3. Pengangguran Konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat.

2.1.5.3 Penyebab Pengangguran

Menurut Kaufman dan Hotchkiss, (dikutip dari Basuki Pujoalwanto, 2013), mengibatkan penyebab pengangguran, yaitu:

1. Proses Mencari Kerja. Pada proses ini menyediakan penjelasan teoritis yang penting bagi tingkat pengangguran. Munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam proses ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu disebabkan karena adanya para pekerja yang ingin pindah ke pekerjaan lain, ketidakjelasan informasi yang diterima pencari kerja mengenai lapangan kerja yang tersedia, serta informasi yang tidak jelas pada besarnya tingkat upah yang layak mereka terima.
2. Kekakuan Upah. Besarnya pengangguran yang terjadi dipengaruhi juga oleh tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Penurunan produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan pergeseran atau penurunan pada permintaan tenaga kerja. Akibatnya, akan terjadi

penurunan besarnya upah yang ditetapkan. Dengan adanya kekuatan upah, dalam jangka pendek tingkat upah akan mengalami kenaikan pada tingkat upah semula.

3. Efisiensi Upah. Besarnya pengangguran juga dipengaruhi oleh efisiensi pada teori pengupahan. Efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha para pekerja untuk bekerja.

2.1.5.4 Dampak Pengangguran

Menurut Sukirno (2000:514) ada beberapa akibat buruk dari pengangguran dan dibedakan menjadi dua aspek yaitu:

1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian
 - a. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang.
 - b. Pengangguran tidak menggalakan pertumbuhan ekonomi.
 - c. Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah daripada pendapatan nasional potensial.
2. Dampak perekonomian bagi individu masyarakat
 - a. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.
 - b. Pengangguran menyebabkan kehilangan keterampilan.
 - c. Pengangguran dapat menyebabkan timbulnya penyakit sosial masyarakat.

2.1.6 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan timbulnya kemiskinan, angka kelahiran yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk berkaitan dengan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, dengan tingkat kelahiran yang tinggi akan menyebabkan beban biaya dalam suatu keluarga juga akan bertambah sehingga menyebabkan beban ketergantungan ekonomis. Menurut hasil penelitian empiris, salah satu yang ditimbulkan dari pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat adalah tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Ditasekar, 2014).

2.1.7 Hubungan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memahami dinamika perekonomian disuatu wilayah dengan melihat percepatan perekonomiannya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan akan barang dan jasa akan meningkat, sehingga secara tidak langsung peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang selalu diidentikkan dengan tidak mampunya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dapat dikatakan bahwa saat perekonomian suatu daerah mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

2.1.8 Hubungan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan

Indeks pembangunan Manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup, umur panjang dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mempunyai akses

untuk sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi ini penting dalam pembangunan manusia tersebut dan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan perkapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut (Safira, 2012).

2.1.9 Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Meningkatnya tingkat pengangguran dapat memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian suatu daerah, orang yang tidak bekerja menyebabkan seseorang tidak bisa menghasilkan barang dan jasa. Hal ini akan diikuti dengan turunnya pendapatan perkapita. Sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan permintaan terhadap barang dan jasa akan turun. Semakin banyak pengangguran maka Produk Domestik Bruto yang dihasilkan akan menurun. Dengan demikian pendapatan perkapita yang rendah mengakibatkan tingkat kesejahteraan menurun dan meningkatnya tingkat kemiskinan. Pengangguran dengan kemiskinan sangat erat sekali, tingkat kemiskinan ini akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Jika angka pengangguran turun maka tingkat kemiskinan juga akan mengikutinya. Efek buruk dari pengangguran ialah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang sudah dicapai oleh seseorang (Mulyadi, 2012).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini adalah:

Tabel 2.1: Tabulasi Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------------------|--|--|
| 1. | Whisnu Adhi Saputra (2011) | Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah | Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. |
| 2. | Dita Sekar Ayu (2018) | Analisis Pengaruh PDRB, TPT, IPM, Jumlah Penduduk, Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur | Peningkatan PDRB akan menurunkan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin hal ini mengidentifikasi bahwa faktor kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat kuat. Dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin. |
| 3. | M.Alhudori (2017) | Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi | IPM mempunyai hubungan negatif terhadap penduduk miskin, begitupun sebaliknya. PDRB mempunyai hubungan negatif terhadap penduduk miskin. Jumlah pengangguran mempunyai hubungan positif terhadap penduduk miskin. |

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapatlah dirumuskan Hipotesa dari penelitian ini adalah:

1. Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.
2. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.
3. Diduga variabel Indek Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.
4. Diduga variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Riau dengan menggunakan data yang dimuat dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Adapun alasan penelitian ini dilakukan penulis di Provinsi Riau karena penulis tertarik untuk mengetahui keadaan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk time series selama 15 tahun dari tahun 2005-2019, sehingga Populasi dan Sampel tidak digunakan dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari tahun 2005 hingga tahun 2019. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh dinas pemerintah yang disajikan baik dalam berbagai bentuk seperti, laporan penelitian, jurnal-jurnal, arsip-arsip dari data lembaga instansi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dapat dilakukan penulis dalam membutuhkan data, yaitu pengumpulan data secara Dokumentasi. Dokumentasi berarti data yang

diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia seperti terbitan bentuk laporan tahunan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, selain itu buku-buku referensi, jurnal dan sebagainya.

3.5 Definisi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk ialah bertambahnya jumlah penduduk pada suatu wilayah biasanya untuk mengetahui adanya jumlah penduduk dengan melalui sensus penduduk. Hal ini sama dengan pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh kematian, kelahiran dan migrasi penduduk.

c. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan

perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam satu tahun.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

e. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran yang tinggi juga menunjukkan bahwa penduduk tersebut hanya berfungsi sebagai konsumen tetapi tidak berfungsi sebagai faktor input produksi yang dapat menghasilkan output. Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksud dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkah upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

3.6 Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau maka peneliti ini menggunakan beberapa analisis dan pengujian sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yaitu hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependent. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent apakah variabel independent yang digunakan berhubungan positif atau negatif. Analisis linear berganda ini akan diolah dengan menggunakan evIEWS 9 untuk dilakukan pengujian. Adapun persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

Dimana:

Y = Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau (%)

X₁ = Jumlah Penduduk di Provinsi Riau (Jiwa)

X₂ = PDRB di Provinsi Riau (Miliar Rupiah)

X₃ = Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau (%)

X₄ = Tingkat Pengangguran (%)

β₀ = Konstanta

β₁, β₂, β₃, β₄ = Koefisien Regresi

μ = Error Term (Kesalahan)

Bentuk persamaan berikut ditransformasikan untuk memperkecil variasi data, maka model tersebut diubah dalam bentuk semi logaritma sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

3.6.2 Uji Statistik

Uji statistik menggunakan tiga jenis pengujian sebagai berikut:

1. Uji t

Distribusi t atau uji t merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linear sederhana maupun analisis regresi linear berganda. Uji t bertujuan untuk mengetahui secara partial variabel independen (variabel bebas) berpengaruh terhadap variabel dependen (variabel terikat). Dalam menentukan tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$) dengan kriteria H_0 diterima bila : t probabilitas $> \alpha$ dan H_0 ditolak bila : t probabilitas $< \alpha$.

2. Uji F

Distribusi F atau uji f (Uji Serentak) sebagai kriteria untuk menguji hipotesis. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama, apakah model regresi yang digunakan baik signifikan atau tidak baik signifikan. Dalam menentukan tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$) dengan kriteria H_0 diterima bila : F probabilitas $> \alpha$ dan H_0 ditolak bila : F probabilitas $< \alpha$.

3. Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Nilai koefisien determinasi (R Square) dapat digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan syarat hasil uji F bernilai signifikan. Sebaliknya, jika dalam uji F tidak signifikan maka nilai koefisien R Square

tidak dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel terhadap variabel dependen.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik menggunakan 4 pengujian sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai sebaran data pada sebuah data variabel apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang bersifat normal. Model yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain Jarque-Bera Test (J-B Test). Dalam metode J-B Test, yang dilakukan adalah menghitung nilai skewness dan kurtosis. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas yaitu H_0 : data terdistribusi normal dan H_a : data tidak terdistribusi normal. Untuk melihat data terdistribusi normal atau tidak yaitu:

- a) Jika nilai Jarque-Bera $< \chi^2$ tabel, maka H_0 diterima (data terdistribusi normal).
- b) Jika nilai Jarque-Bera $> \chi^2$ tabel, maka H_a ditolak, (data tidak terdistribusi normal).

Selain itu jika nilai probabilitas $> \alpha$ (0,05) maka data terdistribusi normal dan sebaliknya jika probabilitas $< \alpha$ (0,05) maka data tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk memastikan apakah didalam sebuah model regresi ada kolinearitas antar variabel independen. Uji

multikolinieritas digunakan untuk melihat keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Jika ada kolerasi yang tinggi di antara variabel-variabel independen nya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen nya menjadi terganggu. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nilai VIF < 10 , maka tidak terkena multikolinieritas.
- b) Nilai VIF > 10 , maka terkena multikolinieritas .

3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah ada ketidasmamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan White Test, dimana hipotesa yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

Hipotesa:

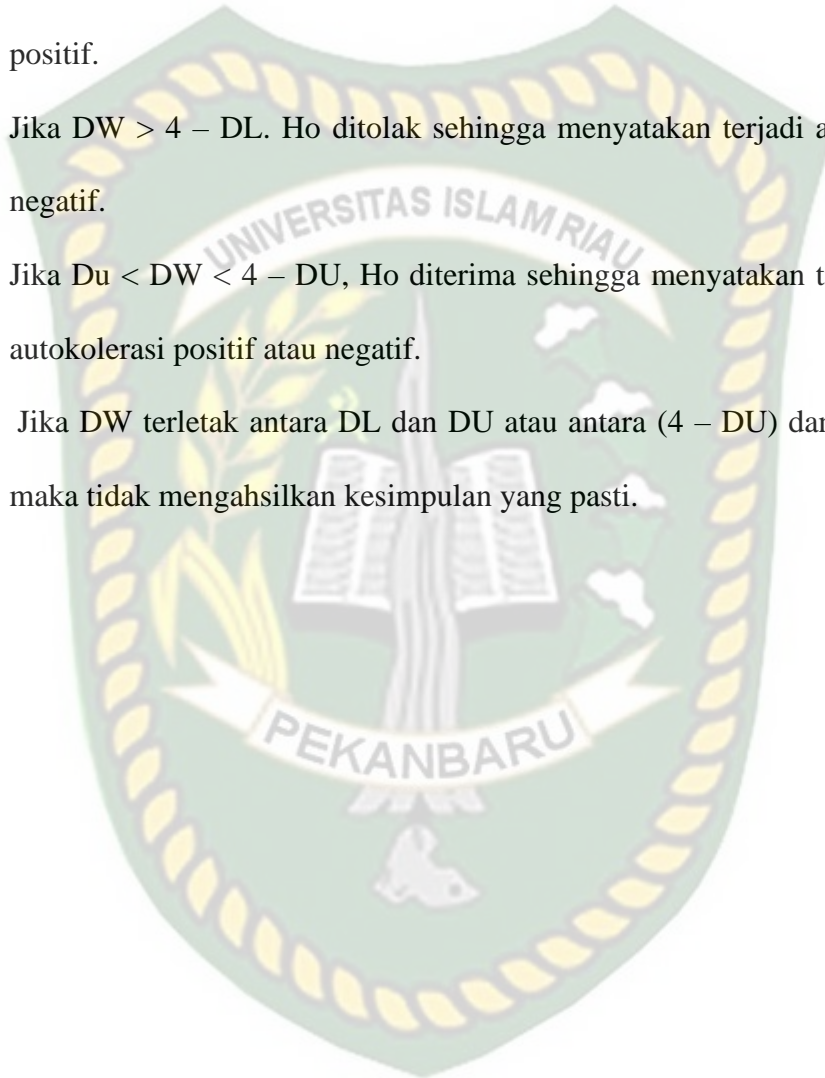
- a. H_0 ; Tidak ada Heteroskedastisits
- b. H_a : Ada Heteroskedastisitas

4. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi yaitu suatu analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui kolerasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Pengujian ini mempunyai arti bahwa hasil suatu tahun tertentu dipengaruhi tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Mendeteksi

ada atau tidaknya autokolerasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson. Metode pengujian Durbin Watson sebagai berikut:

- a.) Jika $DW < D1$, H_0 ditolak sehingga menyatakan terjadi autokolerasi positif.
- b.) Jika $DW > 4 - DL$, H_0 ditolak sehingga menyatakan terjadi autokolerasi negatif.
- c.) Jika $Du < DW < 4 - DU$, H_0 diterima sehingga menyatakan tidak terjadi autokolerasi positif atau negatif.
- d.) Jika DW terletak antara DL dan DU atau antara $(4 - DU)$ dan $(4 - DL)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Riau

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas area sebesar 8.915.016 Hektar. Disamping itu, daerah lautan yang berbatasan dengan negara lain diperkirakan luas daerah Zona Ekonomi Eksklusif sebesar 379.000 km². Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01 ° 05' 00" Lintang Selatan sampai 02° 25' 00" Lintang Utara atau antara 100° 00' 00" sampai 105° 05' 00" Bujur Timur.

Di daerah daratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana penghubung seperti Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m, dan Sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai ini yang membelah dari pegunungan daratan tinggi. Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut. Batas-batas Daerah Riau yaitu:

- Sebelah Utara : Selat Singapura dan Selat Malaka serta Provinsi Sumatra Utara
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Selat Berhala serta Sumatra Barat.
- Sebelah Timur : Laut Cina Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau serta Selat Malaka
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Sumatra Utara.

Sedangkan batas-batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau adalah:

1. Kabupaten Kuantan Singingi :

Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kabupaten Indragiri Hulu :

Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Kabupaten Kuantan Singingi

Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Kabupaten Indragiri Hilir :

Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

4. Kabupaten Pelalawan :

Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

5. Kabupaten Siak :

Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Pelalawan

Sebelah Barat : Kota Pekanbaru

Sebelah Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti.

6. Kabupaten Kampar :

Sebelah Utara : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi

Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

7. Kabupaten Rokan Hulu :

Sebelah Utara : Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar

Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Kampar.

8. Kabupaten Bengkalis :

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Selatan : Kabupaten Siak

Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir dan kota Dumai

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

9. Kabupaten Rokan Hilir :

Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara dan Selat Malaka

Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis

Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Utara

Sebelah Timur : Kota Dumai.

10. Kabupaten Kepulauan Meranti :

Sebelah Utara : Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis

Sebelah Selatan : Kabupaten Siak

Sebelah Barat : Kabupaten Siak

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

11. Kota Pekanbaru :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak

Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan.

12. Kota Dumai :

Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis

Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis

Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir

Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis.

Daerah Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten (Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti) dan 2 Kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Setiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan Kota oleh seorang Walikota.

Berikut ini data mengenai banyaknya Kecamatan dan Kelurahan/Desa menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Tabel 4.1 : Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa di Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|-----|-------------------|-----------|----------------|
| 1. | Kuantan Singingi | 15 | 229 |
| 2. | Indragiri Hulu | 14 | 194 |
| 3. | Indragiri Hilir | 20 | 236 |
| 4. | Pelalawan | 12 | 118 |
| 5. | Siak | 14 | 131 |
| 6. | Kampar | 21 | 250 |
| 7. | Rokan Hulu | 16 | 145 |
| 8. | Bengkalis | 11 | 155 |
| 9. | Rokan Hilir | 18 | 198 |
| 10. | Kepulauan Meranti | 9 | 103 |
| 11. | Pekanbaru | 12 | 83 |
| 12. | Dumai | 7 | 33 |
| | Jumlah | 169 | 1.875 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Jumlah Kecamatan yang ada di Provinsi Riau sebanyak 169 Kecamatan dan jumlah Kelurahan/Desa sebanyak 1.875 Kelurahan/Desa. Kabupaten/Kota yang paling banyak Kecamatannya yaitu Kabupaten Kampar sebanyak 21 Kecamatan. Dan Kabupaten/Kota yang paling sedikit Kecamatannya yaitu Kota Dumai dengan jumlah 7 Kecamatan. Sedangkan jumlah Kelurahan/Desa yang paling yaitu Kabupaten Kampar dengan jumlah 250 Kelurahan/Desa. Selanjutnya jumlah Kelurahan/Desa yang paling sedikit yaitu Kota Dumai dengan jumlah 33 Kelurahan/Desa.

4.2 Kondisi Penduduk Provinsi Riau

Penduduk Provinsi Riau terdiri dari berbagai suku dan latar belakang sosial, ekonomi, agama serta kebudayaan yang beraneka raga. Sebagian besar

Penduduk Provinsi Riau yaitu kaum pendatang yang terdiri dari berbagai macam suku seperti: Minang Kabau, Batak, Jawa, China dan lain-lain. Berikut ini data yang menunjukkan perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Riau.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019

| No | Kabupaten/Kota | Penduduk (Jiwa) |
|-----|-------------------|-----------------|
| 1. | Kuantan Singingi | 327.316 |
| 2. | Indragiri Hulu | 441.789 |
| 3. | Indragiri Hilir | 740.598 |
| 4. | Pelalawan | 483.622 |
| 5. | Siak | 489.996 |
| 6. | Kampar | 871.117 |
| 7. | Rokan Hulu | 692.120 |
| 8. | Bengkalis | 573.003 |
| 9. | Rokan Hilir | 714.497 |
| 10. | Kepulauan Meranti | 185.516 |
| 11. | Pekanbaru | 1.143.359 |
| 12. | Dumai | 308.812 |
| | Jumlah | 6.971.745 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya paling terbesar ialah Kota Pekanbaru sebanyak 1.143.359 jiwa dan jumlah penduduk terkecil ialah kepulauan Meranti sebanyak 185.516 jiwa. Dimana perkembangan penduduk dan penyebaran menurut pembagian wilayah Kabupaten/Kota juga berubah beserta kepadatannya. Karena luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten/Kota tidak sama maka ada Kabupaten/Kota yang padat da ada juga yang penduduknya jarang. Terjadinya perubahan penduduk dikarenakan dengan adanya penambahan dan pengurangan jumlah penduduk yang disebabkan oleh faktor Migrasi, Natalis dan Mortalitas. Perubahan penduduk inilah yang menyebabkan adanya akibat yang menyangkut segi fasilitas kehidupan dan segi sosial ekonomi. Dapat dilihat pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap

jumlah penduduk antara Kabupaten/Kota menunjukkan angka pertumbuhan yang berbeda-beda, dimana yang terbesar memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan penduduk ialah oleh faktor Migrasi.

4.3 Kondisi Jumlah Penduduk di Provinsi Riau

Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk mutlak untuk diketahui sebagai pedomanan dalam rancangan maupun sebagai evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan pembangunan. Penduduk Provinsi Riau telah mencapai 6.971.745 jiwa tahun 2019, dalam hal ini menunjukkan suatu tingkat pertambahan penduduk yang pesat, sehingga Provinsi Riau sudah bisa dikategorikan dengan Provinsi yang berkembang jika dilihat dari jumlah penduduk dan berdasarkan pada biro pusat statistik Provinsi Riau. Dan penduduk laki-laki Riau selalu lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

4.4 Kondisi PDRB di Provinsi Riau

Pertumbuhan ekonomi juga dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha), yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya. Penggunaan PDRB atas harga berlaku menurut lapangan usaha ini, dimaksud untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Selama periode tahun 2005-2019 perekonomian di Provinsi Riau relative meningkat. Dari tahun ke tahun tampak mengalami peningkatan, hingga tahun 2019 PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar 765.198.30 miliar rupiah. Pada tahun 2018 jasa lainnya merupakan sektor yang

memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 8,67% disusul oleh jasa perusahaan sebesar 8,19% kemudian 6,44% disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan pada tahun sebelumnya 2017 sektor jasa perusahaan memberikan kontribusi sebesar 7,92% kemudian disusul oleh sektor jasa lainnya sebesar 7,90% dan disusul oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,37% (BPS, 2020).

4.5 Kondisi IPM di Provinsi Riau

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Pada tahun 2018, IPM di Provinsi Riau mencapai 72,44% meningkat dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 71,79%. Angka ini meningkat sebesar 0,65% atau tumbuh sebesar 0,91% dibandingkan tahun 2017. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 5 tahun terakhir mencapai rata-rata 0,74%.

IPM tertinggi di Provinsi Riau berada pada Kota Pekanbaru yaitu sebesar 80,66% sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar 65,23%. Kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat terjadi pada Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebesar 1,31%. Dan pertumbuhan manusia paling lambat terjadi pada Kabupaten Kampar yaitu sebesar 0,43%.

4.6 Kondisi Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau

Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau pada tahun 2019 tercatat sebanyak 190.140 orang setara dengan 5,97% dari jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau sebanyak 31,19 juta orang. Tingkat pengangguran pada tahun 2019 sebesar 5,97% menurun sebesar 0,23% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 6,20%. Meskipun angka tingkat pengangguran turun, jumlah angkatan kerja naik sekitar 77 ribu orang dibandingkan tahun lalu. Penduduk Provinsi Riau yang bekerja mencapai 3 juta orang, ini meningkat sebanyak 80,48 ribu orang dibandingkan tahun 2018. Tingkat pengangguran ini belum bisa mencegah kemiskinan di Provinsi Riau dikarenakan angka yang berbeda-beda setiap tahunnya. Artinya, terjadinya naik turun yang tidak merata masih menyebabkan adanya kemiskinan. Hanya saja pada tahun 2018-2019 tingkat pengangguran turun dan angkatan kerja meningkat.

4.7 Kondisi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau

Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar 7,08% mengalami penurunan sebesar 0,31% dengan jumlah Rp524.861 per kapita perbulan jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 7,39% dengan jumlah Rp487.146 per kapita per bulan. Masalah kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan ialah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Tingkat pengangguran di Provinsi Riau turut membaik pada tahun 2019 sebesar 7,08% disbanding tahun 2018 sebesar 7,39% ini berhubungan dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang positif karena pertumbuhan ekonominya juga naik.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab V Pembahasan, akan dibahas analisis data yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data time series dengan jangka waktu selama 15 tahun dari tahun 2005-2019, dan diolah menggunakan Eviews 9.

5.1 Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Analisis Regresi Linear Berganda, dengan menggunakan beberapa Uji diantaranya yaitu, Uji Statistik dan Uji Asumsi Klasik.

5.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (variabel bebas) yaitu, Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran terhadap variabel dependen (variabel terikat) yaitu, Tingkat Kemiskinan. Berikut ini tabel data hasil analisis regresi linear berganda menggunakan program pengolahan data dari aplikasi *E-views 9* dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*, selanjutnya hasil-hasil pengolahan data yang disajikan dalam bab ini dianggap sebagai estimasi terbaik karena dapat memenuhi kriteria teori ekonomi, statistic, maupun ekonometrika. Hasil estimasi ini diharapkan dapat menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang akan ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 08/03/20 Time: 10:56
 Sample: 1 15
 Included observations: 15

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C | 108.8816 | 34.67489 | 3.140069 | 0.0105 |
| X1 | -9.001875 | 10.06448 | -0.894420 | 0.3921 |
| X2 | -2.806436 | 2.437155 | -1.151521 | 0.2763 |
| X3 | -5.37E-05 | 0.055055 | -0.000975 | 0.9992 |
| X4 | 0.287232 | 0.090807 | 3.163101 | 0.0101 |
| R-squared | 0.965835 | Mean dependent var | | 9.139333 |
| Adjusted R-squared | 0.952169 | S.D. dependent var | | 1.721911 |
| S.E. of regression | 0.376588 | Akaike info criterion | | 1.145869 |
| Sum squared resid | 1.418182 | Schwarz criterion | | 1.381886 |
| Log likelihood | -3.594018 | Hannan-Quinn criter. | | 1.143355 |
| F-statistic | 70.67415 | Durbin-Watson stat | | 2.723031 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Sumber : Hasil Olah data Eviews 9, 2020

Berdasarkan tabel 5.1 hasil analisis regresi linear berganda dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 108,88 - 9,00\text{Log}X_1 - 2,81\text{Log}X_2 - 5,37X_3 + 0,29X_4 + \mu$$

Berdasarkan fungsi persamaan diatas, maka dapat diketahui nilai koefisien dari setiap variabel. Berikut ini dapat dijelaskan maksud dari nilai koefisien setiap variabel tersebut sebagai berikut:

- 1) Nilai Konstanta b_0 sebesar 108,88 ini bermakna bahwa besarnya Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau apabila Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, dan Tingkat Pengangguran sebesar 108,88 persen di Provinsi Riau.
- 2) Nilai Koefisien b_1 -9,00 dapat dilihat dari uji t probabilitas, dengan nilai probabilitas sebesar $0,39 > \alpha (0,05)$, berarti variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di

Provinsi Riau. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk di Provinsi Riau lebih di dominasi oleh usia-usia produktif sehingga kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masih terbuka lebar.

- 3) Nilai Koefisien b_2 -2,81 dapat dilihat dari uji t probabilitas, dengan nilai probabilitas sebesar $0,27 > \alpha (0,05)$, berarti variabel PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.
- 4) Nilai Koefisien b_3 -5,37 dapat dilihat dari uji t probabilitas, dengan nilai probabilitas sebesar $0,99 > \alpha (0,05)$, berarti variabel IPM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin.
- 5) Nilai Koefisien b_4 0,28 dan dapat dilihat dari uji t probabilitas, dengan nilai probabilitas sebesar $0,01 < \alpha (0,05)$, berarti variabel Tingkat Kemiskinan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Pengaruh positif tersebut artinya apabila Tingkat Pengangguran naik sebesar satu persen maka nilai tingkat

pengangguran akan naik sebesar 0,28 persen di Provinsi Riau begitu juga sebaliknya, apabila Tingkat Pengangguran turun sebesar satu persen maka nilai tingkat kemiskinan turun sebesar 0,28 persen di Provinsi Riau.

5.1.2 Uji Statistik

Dalam penelitian ini menggunakan Uji Statistik, yang terdiri dari Uji t, Uji F dan Uji R square. Berikut interpretasi dari masing-masing uji statistic dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Uji t (Distribusi t)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel Jumlah Penduduk, variabel PDRB, variabel IPM dan variabel Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan. Dalam hal ini untuk menentukan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria, H_0 diterima bila : t probabilitas $> \alpha$ dan H_0 ditolak bila : t probabilitas $< \alpha$. Berikut ini dapat dilihat Uji t pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Hasil Uji t

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 108.8816 | 34.67489 | 3.140069 | 0.0105 |
| X1 | -9.001875 | 10.06448 | -0.894420 | 0.3921 |
| X2 | -2.806436 | 2.437155 | -1.151521 | 0.2763 |
| X3 | -5.37E-05 | 0.055055 | -0.000975 | 0.9992 |
| X4 | 0.287232 | 0.090807 | 3.163101 | 0.0101 |

Sumber : Hasil Olah data Eviews 9, 2020

Berdasarkan Tabel Hasil Uji t diatas, maka dapat diketahui:

A. Pengujian terhadap variabel Jumlah Penduduk

Variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai probabilitas sebesar 0,39. Nilai probabilitas sebesar $0,39 > \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Hal ini berarti

secara parsial Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.

B. Pengujian terhadap variabel PDRB

Variabel PDRB memiliki nilai probabilitas sebesar 0,28. Nilai probabilitas sebesar $0,28 > \alpha(0,05)$ maka H_0 diterima. Hal ini berarti secara parsial PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

C. Pengujian terhadap variabel IPM

Variabel IPM memiliki nilai probabilitas sebesar 0,99. Nilai probabilitas sebesar $0,99 > \alpha(0,05)$ maka H_0 diterima. Hal ini berarti secara parsial IPM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

D. Pengujian terhadap variabel Tingkat Pengangguran

Variabel Tingkat Pengangguran memiliki nilai probabilitas sebesar 0,01. Nilai probabilitas sebesar $0,01 < \alpha(0,05)$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti secara parsial Tingkat Pengangguran berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

2. Uji F (Uji Bersama)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Dalam ketentuan pengujian ini apabila F probabilitas $< \alpha(0,05)$ maka H_0 ditolak, dan apabila F probabilitas $> \alpha(0,05)$ maka H_0 diterima.

Dari hasil F (Uji Simultan) dapat diketahui bahwa nilai F probabilitas sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal ini berarti bahwa variabel Jumlah Penduduk, variabel PDRB, variabel IPM dan variabel Tingkat pengangguran secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.

3. Uji Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien Determinasi Berganda (R^2) digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari variabel independen yaitu, Jumlah penduduk, PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau, dengan syarat hasil uji F bernilai signifikan. Sebaliknya apabila dalam uji F tidak signifikan maka nilai koefisien R^2 tidak dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi pengaruh independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil olahan dapat dilihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,96. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi dari Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau adalah sebesar 96% sedangkan sisanya sebesar 4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

5.1.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam Penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Berikut interpretasi dari masing-masing Uji Asumsi Klasik sebagai berikut:

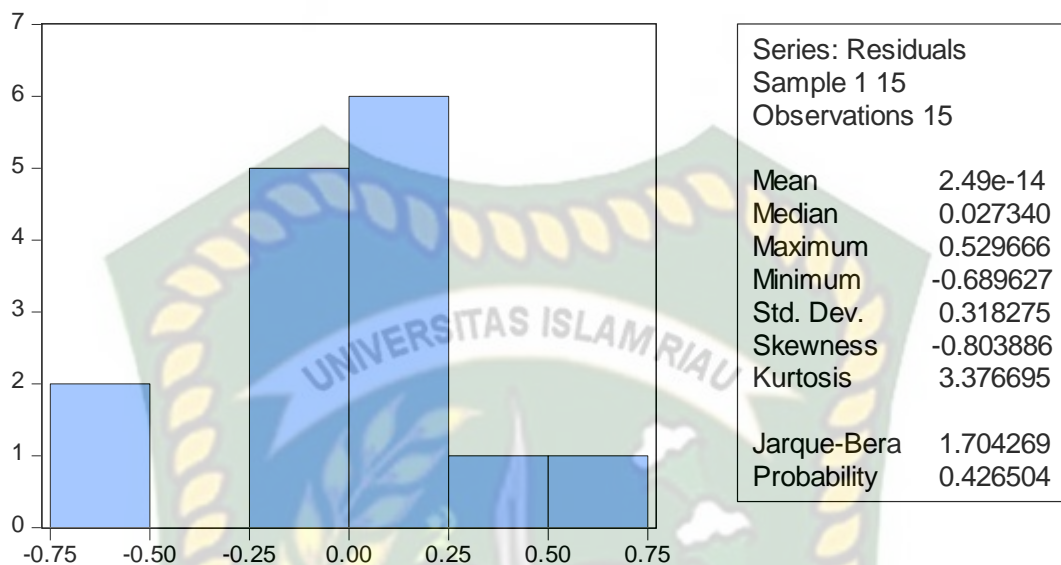
1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai sebaran data pada suatu data variabel berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang bersifat normal. Metode yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain Jarque-Bera Test (J-B Test). Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas yaitu H_0 : data berdistribusi normal dan H_a : data tidak berdistribusi normal. Berikut ini untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak yaitu:

- a. Jika nilai Jarque-Bera $< \chi^2$ tabel, maka H_0 diterima (data berdistribusi normal).
- b. Jika nilai Jarque-Bera $> \chi^2$ tabel, maka H_0 ditolak (data tidak berdistribusi normal).

Selain itu, apabila nilai probabilitas $> \alpha$ (0,005) maka data berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai probabilitas $< \alpha$ (0,005) maka data tidak berdistribusi normal. Berikut Hasil Uji Normalitas pada pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.

Tabel 5.3 Hasil Uji Normalitas Residual



Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9, 2020

Dari hasil estimasi regresi diatas, keputusan terdistribusi normal atau tidaknya residual dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas Jarque-Bera dengan tingkat α (0,05). Diketahui nilai probabilitas Jarque-Bera sebaesar $1,70 > 0,05$ berarti H_0 diterima atau H_0 ditolak. Hal ini bermakna bahwa residual data yang digunakan adalah berdistribusi normal. Jika dilihat dari nilai Jarque-Bera adalah 1,70 dan nilai nilai *Chi Square* adalah 18,31. Nilai Jarque-Bera kecil dari nilai *Chi Square*, maka H_0 diterima yang berarti bahwa dalam model regresi tersebut memiliki distribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk melihat ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai VIF dengan ketentuan jika nilai VIF < 10 maka tidak terkena multikolinieritas, dan jika nilai VIF > 10 maka terkena multikolinieritas. Berikut ini dapat dilihat tabel Hasil Uji Multikolinieritas

pada pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.

Tabel 5.4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 08/03/20 Time: 21:31

Sample: 1 15

Included observations: 15

| Variable | Coefficient Variance | Uncentered VIF | Centered VIF |
|----------|----------------------|----------------|--------------|
| C | 1202.348 | 127171.4 | NA |
| X1 | 101.2938 | 490292.8 | 29.83588 |
| X2 | 5.939723 | 134242.7 | 36.12731 |
| X3 | 0.003031 | 1660.357 | 1.594876 |
| X4 | 0.008246 | 53.40193 | 3.422619 |

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9, 2020

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, maka diketahui nilai VIF dari variabel independen yaitu nilai VIF X_1 sebesar 29,84 dan nilai VIF X_2 sebesar 36,13 dimana kedua variabel ini lebih besar dari 10 artinya variabel ini terkena multikolinieritas. Hal ini dikarenakan antar Jumlah Penduduk dan PDRB tidak memiliki hubungan linier dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik ialah tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas ataupun tidak terjadi gejala multikolinieritas. Sedangkan nilai VIF X_3 sebesar 1,59 dan nilai VIF X_4 sebesar 3,42 dimana nilai variabel ini tidak terkena multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah variasi residual konstanta atau tidak. Dalam hal ini variasi residual yang tidak konstanta akan menimbulkan masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji *white test*, dengan cara melihat nilai probabilitas *Chi-Square*.

- a. Probabilitas Chi-Square $< \alpha$ (0,05), maka data tidak lolos uji heteroskedastisitas (Ho ditolak).
- b. Probabilitas Chi-Square $> \alpha$ (0,05), maka data lolos uji heteroskedastisitas (Ho diterima).

Berikut ini dapat dilihat tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas pada pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiakinan di Provinsi Riau.

Tabel 5.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|--------|
| F-statistic | 2.501965 | Prob. F(11,3) | 0.2440 |
| Obs*R-squared | 13.52563 | Prob. Chi-Square(11) | 0.2604 |
| Scaled explained SS | 7.143623 | Prob. Chi-Square(11) | 0.7873 |

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9, 2020

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, dapat diketahui bahwa nilai Prob. Chi-Square (11) pada Obs*R-squared sebesar 0,26 $>$ 0,05 maka Ho diterima yang berarti dalam model regresi bersifat homokedastisitas atau dengan kata lain tidak terkena gejala heteroskedastisitas. Asumsi heteroskedastisitas terpenuhi maka model regresi ini dapat dinyatakan valid sebagai alat peramalan.

4. Uji Autokorelasi

Dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam satu model regresi linear ada korelasi atau tidak ada korelasi antara variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Adapun kriteria dalam mendeteksi autokorelasi yaitu:

- a. Jika $DW < DL$, H_0 ditolak sehingga menyatakan terjadi autokorelasi positif.
- b. Jika $DW > 4 - DL$, H_0 ditolak sehingga menyatakan terjadi autokorelasi negatif.
- c. Jika $DL < DW < 4 - DL$, H_0 diterima sehingga menyatakan terjadi autokorelasi positif atau negatif.
- d. Jika DW terletak antara DL dan DU atau antara $(4-DU)$ dan $(DL-4)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Pengujian autokorelasi dengan menggunakan metode uji Durbin Watson dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6 Hasil Uji Autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson

| Autokorelasi (+) | Ragu-Ragu | Tidak Ada Autokorelasi | Ragu-Ragu | Autokorelasi (-) |
|------------------|------------|------------------------|----------------|------------------|
| 0 | DL 0,56 | DU 2,21 | 4-DU 4-2,21 | DL-4 0,56-4 |
| | | 2,72 | | 4 |

$DW = 2,72$ (1,79) (-3,44)

Sumber: Hasil Data Olahan, 2020

Dari hasil pengolahan data diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai DW sebesar 2,72. Jika dilihat dari kurva DW maka nilai tersebut terletak diantara DU dan $4-DL$ serta berada pada kriteria tidak ada autokorelasi. Hal tersebut berarti dalam model regresi linear tersebut tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif.

5.2 Pembahasan

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau dalam pembahasan ini dapat menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

5.2.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi uji parsial (uji t), diketahui variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai t probabilitas sebesar $0,39 > 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti jumlah penduduk dengan adanya perkembangan yang pesat akan mengakibatkan pertumbuhan dari segala aktivitas sumber daya ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan yang besar dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Peningkatan dari pendapatan per kapita penduduk berarti pula peningkatan kesejahteraan, peningkatan konsumsi dan berubahnya pola konsumsi itu sendiri, namun jika perkembangan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan perubahan lapangan kerja maka mengakibatkan pengangguran yang besar. Tetapi dalam hal ini, di Provinsi Riau pengaruh Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena banyaknya usia-usia produktif yang lahir sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan maupun bekerja di tempat lain yang mengurangi angka pengangguran itu sendiri. Menurut Whisnu Adhi Saputra (2011) Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

5.2.2 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi uji parsial (uji t), diketahui variabel PDRB memiliki nilai t probabilitas sebesar $0,27 > 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti secara parsial Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan pendekatan pembanguna tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu Provinsi, dalam pertumbuhan ekonomi ini semata-mata tidak hanya diukur berdasarkan PDRB. Tetapi, harus melihat sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat dan siapa saja yang menikmati dari hasil-hasilnya. Sehingga jika terjadinya penurunan PDRB disuatu daerah itu berdasarkan pada kualitas dari konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapat penduduk terbatas, maka rumah tangga miskin harus merubah pola makanan pokoknya ke barang paling rendah dengan jumlah barang yang berkurang (Kuncoro,2004).

Selanjutya, menurut Dita Sekar Ayu (2018)Peningkatan PDRB akan menurunkan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin hal ini mengidentifikasi bahwa faktor kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat kuat. Dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin.

5.2.3 Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi uji parsial (uji t), diketahui variabel IPM memiliki nilai t probabilitas sebesar $0,99 > 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti secara parsial IPM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat

Kemiskinan di Provinsi Riau. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis serta teori yang menjadi landasan teori dari penelitian ini, ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dan akan sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkatan kemiskinan hal ini disebabkan oleh sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin (Nureni, 2017).

5.2.4 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi uji parsial (uji t), diketahui variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai t probabilitas sebesar $0,01 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini dikarenakan dampak dari tingkat pengangguran dengan berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran atau kesejahteraan. Dengan berkurangnya tingkat kemakmuran atau kesejahteraan berpeluang pada tingginya tingkat kemiskinan. Menurut teori Sadorno Sukirno (2004) pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, efek buruk dari tingkat pengangguran ialah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi

kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Selanjutnya menurut M.Alhudori (2017) IPM mempunyai hubungan negatif terhadap penduduk miskin, begitupun sebaliknya. PDRB mempunyai hubungan negatif terhadap penduduk miskin. Jumlah pengangguran mempunyai hubungan positif terhadap penduduk miskin.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, tentang Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Dapat dilihat dari nilai koefisien b_1 sebesar -9,00 dan dilihat dari uji t probabilitas sebesar $0,39 > \alpha (0,05)$. Hal ini disebabkan karena Jumlah Penduduk di Provinsi Riau lebih didominasi oleh usia-usia produktif sehingga kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masih terbuka lebar. (Dalam tabel 5.1: Hasil estimasi, hal 45)
2. Variabel PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Dapat dilihat dari nilai koefisien b_2 sebesar -2,81 dan dilihat dari uji t probabilitas sebesar $0,27 > \alpha (0,05)$. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur mulai berkurang. (Dalam tabel 5.1: Hasil estimasi, hal 45)

3. Variabel IPM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Dapat dilihat dari nilai koefisien b_3 sebesar -5,37 dan dilihat dari uji t probabilitas sebesar $0,99 > \alpha ((0,05)$. Hal ini disebabkan karena sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin. (Dalam tabel 5.1: Hasil estimasi, hal 45)
4. Variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien b_4 sebesar 0,28 dan di lihat dari uji t probabilitas sebesar $0,01 < \alpha (0,05)$. Pengaruh positif tersebut artinya apabila Tingkat Pengangguran naik satu persen maka nilai tingkat kemiskinan di Provinsi Riau akan naik sebesar 0,28 persen dan begitu juga sebaliknya, apabila Tingkat Pengangguran turun sebesar satu persen maka nilai tingkat kemiskinan di Provinsi Riau akan turun sebesar 0,28 persen. (Dalam tabel 5.1: Hasil estimasi, hal 45)

6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mengajukan beberapa saran terkait dalam penelitian ini yaitu, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang pemerintah, pemerintah harus mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat agar lebih banyak nya usia-usia produktif yang bisa mensejahterakan hidup serta bisa menerapkan kebijakan dalam mendorong masyarakat mampu untuk menjadi wirausaha agar mereka bisa mengentaskan kemiskinan. Pemerintah juga harus mendistribusikan pendapatan daerah secara adil dan merata sehingga lapisan msyarakat termasuk masyarakat miskin dapat menikmati hasil dari pembangunan ekonomi demi kesejahteraan bersama.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat sebagai acuan dan referensi untuk peneliti selanjutnya, dan mengkaji lebih dalam tentang pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan.
3. Bagi penulis hasil peneitian, ini dapat membawa dalam bidang ekonomi, sehingga penulis dapat mengembangkan ilmu yang di peroleh dalam mengetik skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhudori, M (2017). *Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*. Jambi:Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jambi.
- Arsyad, Lincoln (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ayu, D.S (2018). *Analisi Pengaruh PDRB, TPT, IPM, Jumlah Penduduk, Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*. Yogyakarta:Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2019), *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau, 2010-2017*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2019), *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2011-2018*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2019), *Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau, 2010-2017*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2019), *PDRB Provinsi Riau Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2010-2018*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2019), *Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2011-2018*.
- Badrudin, Rudy (2012). *Ekonometrika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Faisal H. Basri, S. M.A. (2002). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, N.A. (2016). *Pengaruh Produk Domestik Regional Domestik, Kemiskinan dan Belanja Model Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2008-2019*. Yogyakarta: Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hastitah, D.P. (2017). *Faktor yang Mempengaruhi IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2014*. Yogyakarta: Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Jhingan, M.L. (2003). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, M. (2004). *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mankiw, Gregory. (2000). *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Mantra, Ida Bagus. (2000). *Demografi Umum dan Tenaga Kerja*. Akademi Persindo, Jakarta.

Mudrajad, Kuncoro. (2001). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi kesatu, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mulyadi. (2012). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Napitupulu, A.S. (2017). *Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manuia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatra Utara*. Medan: Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Utara.

Nasir, M. (2008). *Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Eklusif 5(4)

Safira, Y.M. (2012). *Analisis Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Aceh Tengah*. Tesis S2, Program Pascasarjana UNSYIAH. Banda Aceh.

Sasana, Hadi. (2006). *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Dinamika Pembangunan Vol.3 no.2/Desember 2006:145-147.

Saputra, W.A (2011). *Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Semarang: Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Sukirno, S. (2000). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sukirno, S. (2010). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana.

Tadoro, M.P. dan Smith S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan United Kingdom: Erlangga.

Undang-undang Dasar No.24 Tahun 2004 Tentang Kemiskinan.

Widodo, Tri. (2006). *Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.